

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterlibatan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kertapati. Tujuannya untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

A. Keadaan Umum

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Kecamatan Kertapati, maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan Geografis, keadaan Demografis dan kondisi Pemerintahan Kecamatan Kertapati.

1. Keadaan Geografis Kecamatan Kertapati

a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Kertapati adalah salah satu kecamatan di Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 11

Desember 2000 merupakan sebagian dari Kota Palembang, dengan luas wilayah lebih kurang 4.284,9 Ha yang sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah atau rawa dimana sungai Musi yang anak sungainya yang memisahkan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu I
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir¹

Dilihat dari letaknya wilayah Kecamatan Kertapati ini menjadi sangat penting karena wilayahnya merupakan pintu gerbang Kota Palembang melalui transportasi Darat.

Kecamatan Kertapati Kota Palembang memiliki luas wilayah lebih kurang 4.284,9 Ha² terdiri dari VI (enam) Kelurahan, yaitu :

¹ Data diperoleh dari, Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

² Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Kertapati

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kertapati	96
2	Kemang Agung	302,7
3	Ogan Baru	119
4	Kemas Rindo	362,7
5	Keramasan	1.400
6	Karyajaya	2.000
JUMLAH		4.280,4

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Table 2.2
Luas Lahan di Kecamatan Kertapati Dirinci Menurut Kelurahan dan Jenis Penggunaan Lahan (Ha)

No	Kelurahan	Lahan Pertanian		Lahan Untuk Non Pertanian
		Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah	
1	Kertapati	-	2,50	55,00
2	Kemang Agung	65,00	1,70	93,30
3	Ogan Baru	18,00	10,00	35,00
4	Kemas Rindo	65,00	456,00	1101,00
5	Keramasan	490,00	9,00	303,00
6	Karya Jaya	721,00	42,00	845,00
Jumlah		1.359,00	521,20	1.331,30

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Kertapati Kota Palembang sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 92.683 jiwa yang terdiri dari :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kertapati Kota Palembang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	45.144 jiwa
2	Perempuan	47.539 jiwa
Jumlah		92.683 jiwa

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Jiwa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kertapati	4.271	4.158	8.429
2	Ogan Baru	9.463	9.537	19.000
3	Kemas Rindo	7.739	8.242	15.981
4	Kemang Agung	12.411	14.149	26.560
5	Keramasan	6.137	6.478	12.615
6	Karyajaya	5.123	4.975	10.098
JUMLAH		45.144	47.539	92.683

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

3. Pendidikan

Dalam hal ini Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan dan mencerdaskan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.³

Table 2.5
Jumlah Penduduk Kecamatan Kertapati Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Kelurahan	Tingkat Pendidikan		
		Tidak Sekolah	SD	SLTP
1	Kertapati	4.357	3.342	383
2	Ogan Baru	2.816	2.821	4.152
3	Kemas Rindo	3.070	2.735	2.736
4	Kemang Agung	8.583	4.115	3.751
5	Keramasan	164	5.637	1.508
6	Karya Jaya	3.855	4.379	899
Jumlah		22.845	23.029	13.429

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Table 2.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Kertapati Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

		Tingkat Pendidikan

³ Andri Pratama, *Skripsi Strategi Pemenangan Calon Legislatif Study Tentang Perempuan caleg Parta Demokrat Pada Pemilu 2014 Musi Banyuasin* (Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 2013), H.28-29

No	Kelurahan	SLTA	Diploma	Sarjana
1	Kertapati	327	4	14
2	Ogan Baru	8.489	526	155
3	Kemas Rindo	5.380	1.254	794
4	Kemang Agung	4.162	1.651	4.215
5	Keramasan	5.247	26	43
6	Karya Jaya	836	59	65
Jumlah		24.441	3.520	5.276

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

4. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Kertapati

Berdasarkan pembagian wilayah Administrasi, semua Kelurahan di Kecamatan Kertapati adalah termasuk desa swasembada dimana setiap Kelurahan memiliki kantor Kelurahan di wilayah masing-masing. Kecamatan Kertapati saat ini memiliki 50 Rukun Warga (RW), 257 Rukun Tetangga (RT), dan 19.091 Keluarga yang terbagi dalam 4 Kelurahan yaitu: Kelurahan Karya Jaya dengan jumlah 10 Rukun Warga (RW), 40 Rukun Tetangga (RT), dan 2.411 Keluarga. Kelurahan Keramasan dengan jumlah 7 Rukun Warga (RW) 37 Rukun Tetangga (RT), dan 2.121 Keluarga. Kelurahan Kemang Agung dengan jumlah 8 Rukun Warga (RW) 51 Rukun Tetangga (RT), dan 4.214 Keluarga. Kelurahan Kemas Rindo dengan jumlah 9 Rukun Warga (RW) 40 Rukun Tetangga (RT), dan 4.403 Keluarga.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Kertapati yang bertugas di Kantor Camat dan Kantor Lurah berjumlah 48 orang. Terdiri PNS Kecamatan Kertapati sebanyak 16 orang, Kelurahan Karya Jaya sebanyak 3 orang, Kelurahan Keramasan sebanyak 3 orang, Kelurahan Kemang Agung sebanyak 5 orang, dan Kelurahan Kemas Rindo sebanyak 6 orang. Sedangkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi vertikal dalam Kecamatan Kertapati berjumlah 75 orang, yang terdiri dari 66 PNS laki-laki 9 PNS perempuan.⁴

Table 2.7
Jumlah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Keluarga di Kecamatan Kertapati Dirinci Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)	Keluarga
1	Karya Jaya	10	40	2.411
2	Keramasan	7	37	2.121
3	Kemang Agung	8	51	4.214
4	Kemas Rindo	9	40	4.403
5	Ogan Baru	10	59	4.421
6	Kertapati	6	30	1.521
Jumlah		50	257	19.091

Penyelenggaraan Pemerintahan telah disesuaikan dengan Renstra 2013-2018 Kecamatan Kertapati Kota Palembang seperti yang tercantum :

1. Menyamankan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui

⁴ <http://www.palembangkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB

perumusan bersama visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Kertapati dengan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Kecamatan Kertapati Kota Palembang dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.⁵

B. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kecamatan Kertapati

a. Kondisi Sosial

Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Kecamatan Kertapati, baik Negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 3 sekolah TK, 36 Sekolah Dasar (SD), 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), 6 Sekolah Menengah Atas (SMA). Sarana pendidikan

⁵ Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

negeri dan swasta tersebut digunakan oleh sejumlah murid sekolah negeri dan swasta yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Selama Tahun Ajaran 2017/2018 terdapat murid Taman Kanak-Kanak 225, SD sebanyak 32.957 orang, SMP sebanyak 11.673 orang, dan SMK sebanyak 2.020 orang, SMA sebanyak 4.402 orang. Sementara tenaga guru yang tersedia pada tahun 2016/2017 ini pada masing-masing sekolah adalah TK sebanyak 19 orang, SD sebanyak 1.115 orang, SMP sebanyak 681 orang, dan SMK sebanyak 107 orang, SMA sebanyak 401 orang.⁶

b. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Kertapati memiliki realisasi Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 36,28 persen. Jika dibandingkan antar kecamatan, pencapaian realisasi pajak tertinggi terdapat di Kelurahan Keramasan dengan angka pencapaian 115,92 persen.

Kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Kertapati secara keseluruhan ditopang oleh 1 pasar permanen, 2 pasar darurat, 2 supermarket/swalayan, 4 restoran/rumah makan, 789 toko/ warung kelontong. Pasar permanen Kecamatan Kertapati terdapat di Kelurahan Ogan Baru yang terdiri dari 313 petak kios, 317 los, 662 pedagang, dan 369 pedagang kaki lima.

c. Kondisi Politik

⁶ Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

Pengetahuan politik di Kecamatan Kertapati Kota Palembang cukup berkembang pesat dengan dukungan sarana transportasi dan komunikasi serta teknologi yang canggih saat ini, sehingga masyarakat Kecamatan Kertapati secara tidak canggung lagi dengan fenomena-fenomena yang berkembang, baik itu fenomena politik rasional, nasional, bahkan internasional. Perkembangan partai politik di Kecamatan Kertapati Kota Palembang sudah mengikuti pemilu ditingkat nasional dan terdapat 12 partai politik yang ikut pemilu legislatif di Kota Palembang.

1. Data jumlah Pemilih tetap Pemilihan Legislatif di Kecamatan Kertapati

Sesuai dengan ketentuan mengatur jalannya Pemilihan Umum, maka masyarakat yang telah berhak menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum yakni masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Warga yang memilih adalah yang telah terdaftar dalam DPT yang telah didaftarkan oleh KPUD. Berikut tabel daftar Pemilih tetap saat Pemilihan Legislatif pada daerah Kecamatan Kertapati tahun 2019.⁷

Tabel. 2.8
DPT pemilihan anggota legislatif di Kecamatan Kertapati

No	Kelurahan	DPT	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kemas Rindo	5.756	5.793
2	Kemang Agung	7.430	7.506

⁷ Data diperoleh dari, Dokumen PPK Kertapati, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

3	Keramasan	3.928	3.857
4	Kertapati	3.180	3.217
5	Karyajaya	3.594	3.487
6	Ogan Baru	7.112	7.006
JUMLAH		31.000	30.866

Sumber : Data diperoleh dari Dokumen Profil Kantor Kecamatan Kertapati pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

2. Data Anggota Legislatif Kota Palembang Tahun 2019-2024

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 yaitu Pemilihan Umum, yang selanjutnya Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1994.

Tabel 2.9
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapil 6
Kecamatan Kertapati Kota Palembang

No	Nama	Partai
1	Zainal Abidin, S.H.	Demokrat
2	Ali Sobri, S.IP.	Nasdem
3	M. Syukri Zen	Gerindra
4	Firmansyah	PDIP
5	Fahrie Adianto	Golkar
6	Dr. Fauzi Achmad, S	PAN
7	Siti Suhaepa, S.E.	PKB

8	Iliyas Hasbullah	Demokrat
---	------------------	----------

Sumber : Data diperoleh dari, Dokumen PPK Kertapati, pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

C. Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Sejarah Berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.⁸

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil

⁸ <http://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 20.30 WIB

Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.⁹

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewedahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon.¹⁰

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.¹¹

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai

⁹ <http://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 20.30 WIB

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M.

Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.¹² Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni

¹² <http://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 PUKUL 20.00 WIB

1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.¹³

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁴

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

menolong dalam kebijakan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).¹⁵

Perolehan Suara PKB pada Pemilu 1999 – 2014:

Di bawah komando Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Abdul Muhaimin Iskandar, perolehan suara PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali meroket. Dengan pencapaian 11.292.151 suara (9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI. Padahal, lima tahun sebelumnya atau Pemilu priode 2004-2009, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR RI.

Pada Pemilu tahun 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lingkaran lima besar. Dimana peringkat PKB pada waktu itu berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapat 52 kursi DPR RI. Sayangnya, pada Pemilu 2009-2014 perolehan suara PKB melorot tajam. Partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat

¹⁵ <http://m.pkb.id/page/sejarah-pendirian> diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB

28 kursi DPR. Barulah, pada era kepemimpinan Cak Imin PKB berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan dan menjadi partai pembela rakyat sejati.¹⁶

2. Visi-Misi DPC PKB Kota Palembang

Visi-Misi PKB terdapat dalam *Mabda 'Siyasi*, *Mabda 'Siyasi* ini adalah roh atau jiwa yang merupakan sumber nilai dari segala kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa. *Mabda 'Siyasi* tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi PKB

Terwujudnya masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*As-Shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji setia mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*Al-Amanah Wa Al-Wafau Bi Al-Ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*Al-Istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga Negara didepan Hukum.¹⁷

b. Misi PKB

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Nurazizah Harahap, *Skripsi Partisipasi Politik di DPW PKB Sumatera Selatan (Studi Kasus Pemilu 2009)*. (Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 2013), H.30-34

1. Misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahter lahir batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhnya kemerdekaan, terpenuhnya jiwa raga, seperti pangan, sandang, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan, dan bebas dari penganiayaan, terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama, terpeliharanya akal dan menjamin atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, terpeliharannya kerukunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus, terpeliharanya harta benda. Misi ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar yakni menyerukan kebijakan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.¹⁸
2. Mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan public. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindung terhadap kelompok minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum, sosial budaya yang memasang kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam

¹⁸ <http://m.pkb.id/page/visi-misi/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

3. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diebrikan pada pihak lain memiliki keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keahlian dan kejuangan yang senantiasa memihka kepada pemberi amanat.²⁰
4. Dalam kaitannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus digunakan untuk memperjuangkan dan memberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan dengan lebih maslahat. Parta Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanta itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengolahannya oleh rakyat. Control terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sehingga arena mengesah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaran, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

5. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanism religius (insaniyah diniyah), yang amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi pemimpin bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis.²¹
6. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka dalam pengertian lintas, agama, suku, ras dan lintas golongan yang

²¹ *Ibid.*,

dimanifestasikan dalam bentuk visi misi dan program perjuangan, keanggotaan, dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikan partai.²²

3. Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang.

a. Dewan Mustasyar

1. H.Kartak S.A.S, S.E.
2. Suhadi, S.Ag.
3. A.Rifa'i
4. Rapiudin, S.Ag.

b. Dewan Syura

Ketua : **Zakuan, S.H.**
 Wakil ketua : H. Firmansyah Hadi, S.E
 Wakil Ketua : Antoni Yuzar, S.H., M.H

Sekretaris : **H. Jarjis**
 Wakil Sekretaris : Nahdiyati Wahyudi, S.Ag.
 Wakil Sekretaris : Nopi Herlina, S.E

c. Dewan Tanfidz

Ketua : **Sutami Ismail, S.Ag**
 Wakil Ketua : H.Endar Himawaan, S.E., M.M.
 Wakil Ketua : M. Alvian Al-Farisy

Sekretaris : **Hj. Siti Suhaepah, S.E.**
 Wakil Sekretaris : Riki Rehima, S.E
 Wakil Sekretaris : M. Andre Hamdillah, S.Kom
 Wakil Sekretaris : Debri Suryadhi

Bendahara : **Subeni, S.Sos.I**
 Wakil Bendahara : M. Syahid Zulkarnain

²² Nurazizah Harahap, *Partisipasi Politik di DPW PKB Sumatera Selatan (Studi Kasus Pemilu 2009). Skripsi*, (Palembang : Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 2013), H.30-34

Wakil Bendahara : Meilinda
 Wakil Bendahara : Yogi Akbari²³

**4. Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
 Tingkat Kecamatan Kertapati Kota Palembang.**

a. Dewan Syura

Ketua : Ahmad Ali
 Wakil Ketua : R. Irwani
 Wakil Ketua : Mulyadi

Sekretaris : Romlan Munir
 Wakil Sekretaris : M. Noer
 Wakil Sekretaris : Azhari Aryanto

b. Dewan Tanfidz

Ketua : Richi Ferbrianto
 Wakil Ketua : Hidayat
 Wakil Ketua : Suryadi
 Wakil Ketua : Auriyani

Sekretaris : Budiono
 Wakil Sekretaris : Ibnu Khisam
 Wakil Sekretaris : Ahmad Fuadi
 Wakil Sekretaris : Heriyanto

Bendahara : Gerhana
 Wakil Bendahara : Sri Azrial
 Wakil Bendahara : Soleha

²³ SK.Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Tentang DPC.PKB.Kota Palembang